



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah  
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>

RESEARCH ARTICLE



## Melukiskan Timor Leste: Integrasi dan Peristiwa Santa Cruz dalam Teks dan Historiografi Indonesia

Bryna Rizkinta<sup>1</sup>, Oky Nugraha Putra<sup>2</sup>, Ahmad Fauzan Baihaqi<sup>1</sup>, Fauzan Syahru Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada

Correspondence Author : [brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id](mailto:brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id)

**To cite this article:** Rizkinta, B., Putra, O.N., Baihaqi, A.F., & Rahmadan, F.S. (2025). Melukiskan Timor Leste: Integrasi dan peristiwa santa cruz dalam teks dan historiografi Indonesia. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 8(1), 85-100. <https://doi.org/10.17509/historia.v8i1.81115>.

Naskah diterima : 4 Maret 2025, Naskah direvisi : 7 April 2025, Naskah disetujui : 30 April 2025

### Abstract

The Timor Leste integration into Indonesia and the Santa Cruz Incident were important events in the history of both nations. The integration refers to the incorporation of Timor Leste as the 27th province of Indonesia in 1976, while The Santa Cruz Incident in 1991 influenced global public opinion on the Timor Leste issue. This study aims to examine how the integration process and the Santa Cruz Incident are portrayed in Indonesian texts and historiography. The research employs qualitative methods, namely a comparative historiographical study and critical discourse analysis using the Fairclough model. The Althusserian State Ideological Apparatus approach is used to examine how the ruling ideology plays a role in historical writing. This can be seen in the findings of this study that the historiography of Timor Leste in Sejarah Nasional Indonesia, both regarding integration and the Santa Cruz Incident, was written in an unbalanced manner and with an apologetic narrative. The active role of the Indonesian military and the loss of lives that resulted from it during the integration process were not revealed. In writing about the Santa Cruz Incident, SNI used military sources to describe the violence perpetrated by the military itself. The book narrates that the loss of life was caused by being trampled due to mass panic. This study reveals a bias in Indonesian historiography, which tends to side with those in power while ignoring the perspective of the victims.

**Keywords:** historiography; integration; Santa Cruz Incident; Timor Leste.

### Abstrak

Integrasi Timor Leste ke Indonesia dan Peristiwa Santa Cruz merupakan peristiwa yang penting bagi sejarah kedua bangsa tersebut. Integrasi merupakan bergabungnya Timor Leste menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 1976 sementara Peristiwa Santa Cruz pada 1991 berdampak pada pandangan masyarakat dunia tentang permasalahan Timor Leste. Penelitian berusaha untuk mengkaji bagaimana proses integrasi dan Peristiwa Santa Cruz digambarkan dalam teks dan historiografi Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan kajian komparatif historiografi dan analisis wacana kritis model Fairclough. Pendekatan Ideologi Aparatus Negara Althusserian digunakan untuk melihat bagaimana ideologi penguasa berperan dalam penulisan sejarah. Hal tersebut dapat terlihat dalam hasil penelitian ini bahwa historiografi tentang Timor Leste dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) baik mengenai integrasi dan Peristiwa Santa Cruz ditulis dengan tidak seimbang dan dengan pembelaan. Peran aktif militer Indonesia serta korban nyawa yang terjadi karenanya dalam proses integrasi tidak diungkapkan. Dalam penulisan Peristiwa Santa Cruz, SNI menggunakan sumber dari militer dalam menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer sendiri. Buku tersebut menarasikan bahwa jatuhnya korban jiwa dikarenakan terinjak-injak akibat kepanikan massal. Kajian ini mengungkapkan adanya bias dalam historiografi Indonesia yang cenderung berpihak pada penguasa dan mengabaikan perspektif korban.

**Kata Kunci:** historiografi; integrasi; Peristiwa Santa Cruz; Timor Leste.

## PENDAHULUAN

Integrasi Timor Leste dan Peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili pada 12 November 1991 merupakan salah satu peristiwa kelam bagi sejarah dan hubungan Indonesia dan Timor Leste. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari kekerasan yang dilakukan pihak militer Indonesia terhadap aspirasi kemerdekaan yang disuarakan oleh rakyat Timor Leste. Negara yang dahulu merupakan provinsi ke-27, pada mulanya bukan bagian dari Republik Indonesia ketika merdeka pada 1945. Secara historis daerah-daerah yang kini menjadi Indonesia saat merdeka dikoloni oleh Belanda sedangkan Timor Leste dikoloni oleh Portugis.

Pada 1974, terjadi revolusi di Portugal yang mengakhiri kolonialisme Portugis. Di Timor Leste, tiga partai muncul yang mendominasi politik adalah Fretilin (*Frente Revolucionara Timor Leste Independente*) merupakan partai radikal yang ingin segera merdeka, UDT (*União Democrática Timorese*) yang ingin merdeka secara bertahap, dan Apodeti (*Associação Popular Democrática Timorese*) merupakan partai terkecil bila dibandingkan kedua partai sebelumnya yang ingin bergabung dengan Indonesia. Dalam pertengahan 1975 Fretilin telah menempati posisi-posisi penting. Pada Agustus 1975, usaha kudeta yang dilakukan UDT yang dilawan oleh Fretilin dengan bantuan militer Portugal menimbulkan perang saudara (Ricklefs, 2007, hlm. 590).

Pemerintah Indonesia sendiri tidak menginginkan adanya sebuah negara merdeka dan yang memiliki kecenderungan kiri di dalam daerah kepulauannya. Pencegahan kemerdekaan itu berpuncak kepada invasi ke Timor Leste pada 7 Desember 1975. Dalam serangan tersebut, diperkirakan terdapat 60.000 warga sipil atau 10% dari populasi Timor Leste yang tewas. Pada April 1976, pasukan Indonesia telah mendarat sebanyak 30.000–35.000 prajurit dengan korban tewas sekitar 500 dalam pertempuran. Fretilin yang terdesak memobilisasi anggotanya ke bukit untuk meneruskan perlawanan. Pada Juli 1976, Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. Negara-negara tetangga dan Barat mendukung Indonesia karena lebih memprioritaskan hubungan dengan Indonesia daripada hak rakyat Timor Leste (Ricklefs, 2007, hlm. 591). Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia sampai pada 1999 ketika sesudah reformasi Presiden Habibie menawarkan referendum (Vickers, 2013, hlm. 218).

Di tahun yang sama ketika invasi Timor Leste, pada 1975, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu sejarah Indonesia. Pada tahun tersebut diterbitkan Sejarah Nasional Indonesia atau yang disebut SNI. Buku ini ditulis oleh banyak ahli sejarah ternama dari kampus-

kampus terbaik di Indonesia (Mcgregor, 2008, hlm. 272). SNI disusun untuk membuat suatu historiografi yang bercorak Indonesia-sentris. Sartono Kartodirdjo selaku editor umum, mengatakan bahwa penyusunan SNI, merupakan usaha dekolonisasi dalam bidang penulisan sejarah. Diharapkan agar buku tersebut akan menimbulkan kesadaran nasional dengan mengenal identitas bangsa melalui sejarah. Buku SNI diharapkan akan digunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah-sekolah dasar yang ketika itu dianggap sangat rendah mutunya. Dalam sambutan edisi ke-4, Nugroho Notosusanto (1984) mengatakan berdasarkan buku babon SNI, disusun buku pegangan bagi siswa SMP dan SMA. Menurut Wood (2005, hlm. 29) SNI sepenuhnya mencerminkan konsep Orde Baru tentang identitas Indonesia dan keadaan sejarah masa lalu yang menghasilkan identitas tersebut.

Salah satu bagian yang cukup memunculkan perdebatan dalam buku tersebut adalah pada jilid ke-6 bagian dengan sub judul Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia yang dieditori oleh Nugroho Notosusanto. Bagian yang menceritakan sejarah kontemporer Indonesia ini dianggap bias. B.M. Diah, jurnalis, mengatakan bahwa buku tersebut sangat bias terhadap Soekarno. Diah menduga bahwa bias tersebut muncul karena keinginan untuk menegaskan keyakinan individu dengan mengorbankan metodologi sejarah (Curaming, 2020, hlm. 114).

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo secara kritis mengatakan bahwa Nugroho memiliki mentalitas “asal bapak senang” dan melakukan pembohongan. Ia juga mengatakan bahwa penulisan sejarah di Indonesia sebagai kekacauan atau kemelut dan secara tegas mengatakan bahwa jilid 6 tidak memenuhi prasyarat keilmuan (Curaming, 2020, hlm. 116). Pemerintah menganugerahkan SNI status “buku sejarah standar” dan mempertahankannya selama puluhan tahun meskipun memiliki kekurangan. Hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kekuasaan politik yang mencoba mendefinisikan pengetahuan sejarah (Curaming, 2020, hlm. 114). Sebagai buku yang bersifat “sejarah nasional” tentu saja bersifat sangat subjektif dan mengedepankan kepentingan Indonesia sebagai sebuah nasion, bangsa. Benar-salah tetaplah menjadi bagian dari kebanggaan identitas nasional Indonesia (Ali, 2012, hlm. 209). Pangkal dari rasa berat sebelah itu adalah jiwa nasional itu sendiri. Suatu sejarah nasional disusun berdasarkan kepada; keyakinan nasional, pembabakan waktu, norma-norma penguji fakta, dan cara penyusunan dan penafsiran fakta (Ali, 2012, hlm. 210).

Sedangkan, Purwanto (2006, hlm. 58) berpendapat bahwa keberadaan penulisan sejarah yang bersifat

Indonesia-sentris tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menentukan kepribadian bangsa atau identitas bangsa sesuai dengan situasi yang telah berkembang dari awal kemerdekaan. Dengan prinsip dekolonisasi historiografi yang memiliki sifat ultra nasionalis dan lebih mementingkan retorika daripada analisis dan sintesis secara kritis berdasarkan ilmu sejarah. Perkembangan historiografi Indonesia-sentris dari awal cenderung menjauh dari prinsip-prinsip objektivitas sejarah. Di dalam kondisi otoritarianisme masa Soekarno dan Soeharto, perdebatan sejarah secara terbuka hingga mampu berkontribusi dalam landasan keilmuan bagi historiografi Indonesia-sentris tidak dimungkinkan. Dengan peran negara yang sangat dominan, prinsip dalam penulisan sejarah yang direncanakan oleh tradisi historiografi Indonesia-sentris hanya mendapatkan label sebagai historiografi yang disponsori oleh negara.

Selain itu, Purwanto melanjutkan bahwa dalam setiap rezim yang berkuasa, dalam konteks ini di Indonesia, mereka pasti akan menggunakan legitimasi sejarah dalam ranah kekuasaan mereka dengan tujuan menopang kekuasaan yang sedang mereka miliki (Purwanto & Adam, 2017, hlm. 11-12, 15). Dalam persoalan metodologis dalam saling-sanggahnya dengan Asvi Warman Adam, penulisan historiografi di Indonesia cenderung merupakan “balas dendam” semata alih-alih melihat bahwa sejarah sebagai suatu peristiwa memiliki dimensi yang beragam dan ketika dituliskan sebagai kisah, tidak akan pernah berakhir dan akan selalu subjektif. Oleh karena itu, penting kiranya dalam penelitian ini upaya dekonstruksi dan mencari sudut pandang alternatif dari narasi produksi historiografi Indonesia yang menarasikan mengenai Peristiwa Santa Cruz di Timor Leste tersebut (Purwanto & Adam, 2017, hlm. 34-36).

Tidak sedikit kajian tentang buku teks sejarah dan buku Sejarah Nasional Indonesia yang pernah ditulis. Beberapa di antaranya adalah Curaming (2020) yang mengkaji sejarah dan muatan dari Sejarah Nasional Indonesia. Susanto dkk. (2022) membahas tentang pola narasi sejarah yang digunakan oleh buku teks. Ruslan dkk. (2024) mengkaji tentang buku teks sejarah melalui pendekatan teoritis relasi kuasa Michael Foucault. Krisnadi (2022) membahas tentang Orde Baru yang menyusun historiografi dan buku teks. Utami & Widiadi (2016) membahas tentang wacana kebinekaan dalam buku teks sejarah. Sariyatun dkk. (2024) membahas tentang representasi peristiwa Gerakan 30 September dalam buku teks sejarah kelas 8 melalui analisis wacana kritis. McGregor (2008) mengkaji secara ekstensif tentang bagaimana ideologi militerisme Orde Baru memengaruhi penulisan sejarah Indonesia.

Penelitian ini berusaha melengkapi kajian-kajian tentang buku teks sejarah dan historiografi Indonesia tentang bagaimana penggambaran persoalan Timor Leste, khususnya proses integrasi pada 1975 dan 1976 dan Peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada 11 November 1991. Integrasi dipilih karena momen tersebut merupakan dimulainya konflik berkepanjangan antara elemen pro-kemerdekaan Timor Leste dan Indonesia. Sedangkan, Peristiwa Santa Cruz dipilih karena peristiwa ini mengubah persepsi masyarakat Barat tentang kebrutal yang dilakukan negara serta penderitaan rakyat Timor Leste yang menguatkan solidaritas transnasional untuk tujuan menentukan nasib sendiri bagi Timor Leste, menentang posisi politik pemerintahan Barat yang telah mapan, dan memberikan tekanan bagi Indonesia (Kent, 2024, hlm. 266). Dengan mengetahui bagaimana teks dan historiografi Indonesia menggambarkan sejarah tentang Timor Leste, kita dapat melihat perkembangan penulisan historiografi dan faktor-faktor yang memengaruhi penulisan sejarah tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu komparatif historiografi dengan membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan dari berbagai historiografi yang disponsori oleh pemerintah dan yang tidak mengenai integrasi dan Peristiwa Santa Cruz. Kajian ini juga dibantu oleh analisis wacana kritis (AWK) dalam memahami wacana dalam historiografi “resmi”. Menurut Fairclough (2010, hlm. 10) analisis ini tidak semata-mata berfokus pada wacana atau teks secara konkret, melainkan merupakan bagian dari suatu kajian transdisipliner yang sistematis mengenai hubungan antara wacana dan berbagai elemen lain dalam proses sosial. Sedangkan menurut Ruth Wodak (2001, hlm. 2), AWK merupakan pendekatan yang secara mendasar berfokus pada analisis hubungan struktural yang tidak transparan maupun transparan terkait dominasi, diskriminasi, kekuasaan, dan kontrol yang tercermin dalam bahasa. AWK bertujuan untuk mengkaji secara kritis ketidaksetaraan sosial sebagaimana diekspresikan, ditandai, dibentuk, dilegitimasi, dan sebagainya melalui penggunaan bahasa atau dalam wacana. Bagi Fairclough wacana berperan dalam konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna. Analisis Fairclough memberikan model tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Munfarida, 1970, hlm. 9). Dimensi pertama mengacu pada teks sebagai produk dari suatu proses produksi. Dimensi

kedua mencerminkan praktik diskursif yang berkaitan dengan bagaimana teks berinteraksi dengan individu atau masyarakat, baik dalam proses pembentukan maupun penafsirannya. Sementara itu, dimensi ketiga merujuk pada praktik sosial atau konteks yang lebih luas, yakni kondisi sosio-kultural yang melingkupi dan memengaruhi proses produksi serta interpretasi teks tersebut (Munfarida, 1970, hlm. 16).

Teks dan sumber yang digunakan dalam kajian ini adalah karya-karya yang menggambarkan tentang Timor Leste antara lain monograf Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (1976) dan Integrasi Timor Timur, artikel ilmiah dari J. Kristadi, anggota CSIS (Pusat Studi Strategis dan Internasional), yang berjudul “Dekolonisasi Timor Timur” (1986), buku sejarah Sejarah Nasional Indonesia terbitan pertama yang terbit pada 1975, edisi 1984, dan edisi termutakhir yang terbit pada 2019, Indonesia dalam Arus Sejarah, dan buku teks untuk anak sekolah menengah Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sumber dari Indonesia tersebut akan dibandingkan oleh laporan tulisan dari Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi atau *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste* (CAVR) yang berjudul *Chega!* (2010). Perbandingan historiografi Indonesia dan laporan dari Komisi memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi bias, kesenjangan narasi, serta pola dalam penyajian sejarah.

SNI merupakan salah satu karya penting dalam historiografi Indonesia karena menjadi rujukan bagi pengajaran pendidikan di sekolah. Bagi Louis Althusser (2014, hlm. 53) pemikir marxis, seperti Karl Marx, berpendapat bahwa struktur setiap masyarakat terdiri dari ‘tingkatan’ atau ‘unsur-unsur’ yang dihubungkan oleh bentuk determinasi tertentu: infrastruktur atau basis ekonomi dan superstruktur, yang sendiri terdiri dari dua “tingkatan” atau “unsur”, yaitu tingkat politik-legal (hukum dan negara) dan tingkat ideologis (berbagai ideologi: agama, moralitas, hukum, politik, dan sebagainya). Dalam paradigma ini, Althusser (2014, hlm. 52) berpendapat bahwa sekolah mengajarkan “keterampilan”, tetapi dalam bentuk untuk memastikan ketundukan terhadap ideologi yang berkuasa. Sekolah merupakan aparatus ideologi negara dalam bidang pendidikan memastikan dominasi kelas penguasa yang memegang kekuasaan negara. Aparatus pendidikan merupakan aparatus ideologi negara yang paling dominan dalam formasi sosial kapitalis yang telah matang (Althusser, 2014, hlm. 143). Tema-tema nasionalisme dan militerisme Orde Baru disuarakan dalam buku teks dan historiografi Indonesia melalui aparatus ideologi negara.

Dari sini kita perlu melihat kegunaan atau fungsi dari sejarah yang dapat ditransmisikan baik melalui pendidikan di sekolah ataupun melalui media komunikasi, seperti buku, yang dapat diakses masyarakat luas sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparatus ideologi negara. Sartono Kartodirdjo (1993, hlm. x) melihat perkembangan sejarah sendiri salah satunya dipengaruhi oleh proses nation building yang menuntut suatu rekonstruksi sejarah nasional yang mewujudkan kristalisasi identitas bangsa Indonesia. Secara pragmatis, Kuntowijoyo (2013) melihat berbagai macam kegunaan eksternal sejarah, yaitu berbagai fungsi pendidikan seperti pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan. Selain itu, secara ekstrinsik, sejarah dapat berfungsi sebagai rujukan dan bukti. Sejarah juga telah terbukti menjadi alat politik seperti yang ditunjukkan Nielsen (2024) dalam tulisannya tentang bagaimana Putin menggunakan sejarah dalam konflik Rusia dan Ukraina. Peran sejarawan terhadap realitas politik sendiri telah dibahas dalam tulisan Motadel (2023). Dalam konteks politik Orde Baru di Indonesia, hal ini telah ditunjukkan secara rinci oleh McGregor (2008).

Dalam fungsi masa lalu sejarah, Bernard Lewis (1975, hlm. 11–12) membagi sejarah menjadi tiga jenis, yaitu *remembered history* (sejarah yang diingat), *recovered history* (sejarah yang dipulihkan), dan *invented history* (sejarah yang diciptakan). Sejarah yang diingat merupakan ingatan kolektif suatu komunitas atau bangsa untuk diingat sebagai sesuatu yang penting. Sejarah yang dipulihkan merupakan peristiwa sejarah yang dilupakan, tetapi kemudian dipulihkan. Sedangkan sejarah yang diciptakan merupakan sejarah untuk suatu tujuan. Menurutnya, penciptaan sejarah memiliki beragam jenis dan fungsi. Secara umum, hal ini bertujuan untuk memperindah masa lalu, memperbaiki, atau menghapus bagian-bagian yang dianggap tidak menyenangkan, lalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih dapat diterima, lebih menginspirasi, dan lebih selaras dengan tujuan tertentu (Lewis, 1975, hlm. 56). Dalam konteks penulisan sejarah Indonesia, hal ini nampak bagaimana beberapa peristiwa pelanggaran HAM, seperti tragedi Santa Cruz dikaburkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggambaran Integrasi Timor Leste dan Peristiwa Santa Cruz dalam Teks dan Historiografi Resmi Indonesia

Salah satu teks paling awal yang menggambarkan tentang integrasi Timor Leste dan Indonesia adalah buku yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI

berjudul *Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur* yang diterbitkan pada 1976. Dalam teks tersebut, Arnaldo Dos Reis Araujo, Ketua Pemerintahan Sementara Timor Timur, berpidato di Gedung DPR Timor Timur mengatakan bahwa pada hakekatnya rakyat Timor Leste dengan rakyat Indonesia satu, tetapi dipisahkan oleh kolonialisme selama empat abad. Penjajahan tersebut membuat kondisi sosial dan ekonomi rakyat Timor Leste dalam keadaan yang menyedihkan sehingga rakyat menyadari satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib adalah dengan kembali bersatu dengan saudara-saudaranya, yaitu rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai manifestasi dari kehendak rakyat untuk bergabung dengan Indonesia (Departemen Penerangan, 1976, hlm. 17). Narasi dan sumber ini nantinya digunakan oleh SNI dalam penulisan sejarah integrasi.

Dalam *Integrasi Timor Timur* (1982), buku ini dimulai dengan kutipan dari Gough Whitlam, mantan Perdana Menteri Australia “Penggabungan Timor Timur ke Wilayah Indonesia adalah pantas dan biasa seperti penggabungan Goa ke Wilayah Indonesia”. Bab pertama buku tersebut memang merupakan wawancara Ibnu Muchhayat dengan mantan perdana menteri tersebut. Whitlam mengatakan bahwa secara alamiah, terdapat kenyataan bahwa masyarakat Timor Leste memiliki keinginan menjadi bagian dari Negara Indonesia. Ia membandingkannya dengan Goa, yang juga dijajah Portugis sekarang merupakan bagian dari India. Pemerintah Australia sendiri ketika itu menganggap bahwa adalah Fretilin merupakan komunis dan Indonesia memiliki kekhawatiran kepada komunis dan kelompok sparatisme. Wilhem juga menggunakan argumen sejarah untuk mengukung integrasi, mengatakan bahwa Pulau Timor sesungguhnya merupakan adalah rekayasa dengan pembagian dari Portugis dan Belanda pada masa lalu. Sebelumnya orang-orang Timor tidak pernah dipisahkan dan mereka memiliki bahasa yang sama dan memiliki kebudayaan yang serupa di berbagai kegiatan di kedua provinsi tersebut (Departemen Penerangan, 1982, hlm. 15). Bab kedua dan terakhir dari buku tersebut adalah konferensi pers Whitlam di gedung CSIS pada 5 Maret 1982.

Dalam SNI edisi 1984, masuknya Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia dikarenakan Indonesia menilai kemerdekaan bagi Timor Leste tidaklah rasional karena rakyat Timor Leste tidak punya cukup memiliki tenaga terdidik untuk membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur diri sebagai negara sendiri dan bahwa negeri tersebut tidak memiliki sumber daya nasional sebagai jaminan untuk berdirinya sebuah negara bebas, merdeka dan berdaulat. Hal tersebut

akan membuat masuknya kekuatan dari luar apabila Timor Leste mendapatkan kemerdekaan penuh. Jika hal tersebut terjadi akan mengakibatkan ketidakstabilan yang mungkin akan memengaruhi wilayah sekitar. Faktor itu lah yang dikhawatirkan oleh Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi. Juga dikatakan bahwa dalam proses dekolonisasi, muncul pula kekuatan politik di kalangan rakyat Timor Leste yang memiliki aspirasi untuk berintegrasi dengan Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 489).

Revolusi pada 1974 yang terjadi di Portugal membuat perubahan radikal bukan hanya di negara tersebut melainkan juga negara-negara koloninya. Setelah revolusi di Portgal tersebut yang memberikan kebebasan bagi koloni dengan kebijakan dekolonisasinya, di Timor Leste muncul tiga kekuatan partai politik, yaitu UDT, Fretilin, dan Apodeti. Disamping itu juga ada partai kecil lainnya yaitu Kota dan Trabalhista yang memiliki pandangan yang sama dengan Apodeti. UDT menginginkan tetap berada di bawah Portugal sebagai negara bagian Timor Portugis. Di lain pihak, Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh. Sedangkan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia. Karena keinginan itu Apodeti dikacam oleh dua partai lainnya (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 486).

Namun, demi semangat dekolonisasi ketiga partai tersebut membentuk koalisi yang tidak lama akan pecah. Dalam perkembangannya Fretilin bergerak kearah komunisme, sedangkan UDT sangat menentang komunisme. UDT bahkan mengubah namanya menjadi *Movimento Anti-Comunista* (MAC). Sedangkan, Apodeti digambarkan tetap konsisten untuk integrasi dengan Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa kedua bangsa tersebut memiliki persamaan dan. hubungan yang erat, baik secara historis, etnis, serta geografi. Dengan begitu integrasi akan menjamin stabilitas di seluruh kawasan tersebut (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 488). Kondisi Timor Leste kemudian digambarkan tidak stabil akibat teror yang dilakukan oleh Fretilin yang menyebabkan masalah pengungsi bagi Indonesia. Kemudian Fretilin mengumumkan secara sepihak “Republik Demokrasi Timor-Timur” yang dianggap SNI merupakan taktik untuk menutupi kekejaman teror yang dilakukan oleh mereka terhadap rakyat Timor Leste. Untuk mengimbangi ini, gabungan dari Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalhista menguarkan proklamasi tandingan yang bernama Proklamasi Balibo. Proklamasi tersebut merupakan pernyataan penggabungan antara Timor Leste (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 492).

Historiografi lainnya adalah *Timor Timur dalam Gerak Pembangunan* yang diterbitkan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan pada 1988. Dalam karya tersebut, prinsip integrasi yang dibicarakan dalam pertemuan London 19 Maret 1975 dianggap oleh pihak Portugis dan Indonesia sebagai jalan terbaik dalam permasalahan Timor Leste. Hal itu dikarenakan bahwa rakyat Timor masih belum matang dalam berpolitik untuk menentukan kehendaknya (Lapian & Chaniago, 1988, hlm. 43). Ketidakstabilan politik di Timor Leste yang salah satunya menyebabkan arus pengungsi dari penduduk Timor Leste menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia mengambil tindakan (Lapian & Chaniago, 1988, hlm. 62).

J. Kristani (1986), analis CSIS, menulis artikel berjudul “Dekolonisasi Timor-Timur”. Menurutnya menyatukan Timor Leste sebenarnya merupakan merupakan usaha untuk menyatukan kembali bagian yang terpisah yang pada hakikatnya adalah satu. Setelah serangan balasan dari Fretilin akibat revolusi yang dilancarkan UDT pada 11 May 1974 yang gagal, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena serangan balasan gabungan yang dilancarkan UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista berhasil mengalahkan Fretilin. Kekuatan ini juga diperkuat oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Dengan pasukan gabungan yang juga dibantu oleh sukarelawan Indonesia, akhirnya pada 7 Desember 1975 mereka berhasil merebut Dili.

Terdapat buku teks yang ditujukan untuk pelajar sekolah SMP mengenai sejarah Timor Leste, yaitu Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1995. Dalam bab ke-5 “Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi”, dinarasikan bahwa militer Indonesia tidak digambarkan berperang aktif. Konflik di Timor Leste digambarkan pertarungan antara dua belah pihak, yaitu Apodeti-UDT yang dibantu oleh “sukarelawan Indonesia” dengan pihak Fretilin. Kemenangan pihak Apodeti-UDT digambarkan dengan kemenangan rakyat, dengan menarasikan “Kemenangan rakyat Timor-Timur dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya ditandai dengan terbentuknya Pemerintahan Sementara Daerah Timor Timur (PSTT) pada tanggal 17 Desember 1975.” Dalam akhir seksi bab tersebut terdapat latihan soal essay yang salah satunya cukup menarik perhatian. Soal nomor enam berbunyi “Apakah keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi diterima begitu saja oleh pemerintah dan rakyat Indonesia?” pertanyaan ini, yang ditunjukkan kepada siswa sekolah seakan-akan integrasi menang keinginan oleh mayoritas rakyat Timor (Basri, 1995, hlm. 95).

Selain integrasi, salah satu peristiwa yang menentukan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste adalah kejadian pembunuhan masal Santa Cruz. Dalam SNI jilid VI edisi pemutakhiran yang diterbitkan pada 2019, terdapat pembahasan singkat mengenai peristiwa tersebut. Dalam subjudul “Peristiwa Dili 12 November 1991” tersebut dituliskan:

Pada 8 Oktober 1996 kelompok anti-integrasi menggunakan sekolah *Eksternato* dan SMPK Santo Paulus sebagai pusat aksi-aksinya. Pada 15 Oktober 1990 terjadi Insiden antara siswa sekolah tersebut dengan aparat keamanan karena aparat keamanan menurunkan spanduk yang menolak Pancasila. Aparat Keamanan dipukul dan senjatanya dirempas, bendera Merah Putih yang berkibar di depan sekolah diturunkan. Pemuda pro-integrasi membalas dan terjadi perkelahian di kompleks Gereja Monte, seorang siswa meninggal dalam bentrokan ini.

Sekalipun operasi keamanan yang dilakukan oleh ABRI secara berangsur-angsur berhasil, keamanan di Timor Timur secara umum telah kondusif, masyarakat Timor Timur masih terpecah antara kelompok pro-integrasi dan kelompok anti-integrasi. Pada 28 Oktober 1991, kembali terjadi bentrokan antara dua kelompok tersebut di depan Gereja Motael. Dalam bentrokan ini jatuh korban pada kedua belah pihak. Kelompok anti-Integrasi Memanfaatkan peristiwa ini dengan melakukan demonstrasi anti pemerintah RI bertepatan dengan momentum kedatangan pelopor khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pieter Kooijmans. Pada 12 November 1991, berlangsung upacara misa di Gereja Motael, dilanjutkan dengan acara tabur bunga bagi pemuda anti-integrasi yang tewas pada peristiwa 28 Oktober 1991. Selesai acara misa, para jemaat yang mayoritas anak muda tidak segera meninggalkan tempat, tetapi berbaris menuju ke kota sambil sambil mengacungkan tangan dengan yel ‘Viva Fretilin’ ‘Viva Xanana Gusmao’. Sebagian dari mereka membeberkan poster ‘Check The Prison’ yang ditunjukkan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB yang berada di Hotel Turismo. Tiga pleton aparat keamanan memblokir jalan, tetapi massa kemudian masuk ke pusat kota dan mengamuk. Mayor Gerhan Lentara yang berusaha menenangkan massa ditusuk dengan pisau, massa panik, suasana tidak terkendali, sebagian menuju makam Santa Cruz. Aparat keamanan lalu bersiaga penuh di makam, dari dalam terdengar suara tembakan dan sebuah granat tangan dilempar ke aparat keamanan. Aparat keamanan membalas dengan melepaskan tembakan peringatan, akibatnya terjadi kepanikan luar biasa, dan ribuan orang

mati terinjak-injak karena suasana kacau (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 649–650).

Dalam narasi tersebut bisa dilihat bahwa penyebab korban jiwa adalah karena terinjak-injak akibat kepanikan massal. Selain SNI, terdapat buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang dituliskan oleh sejarawan-sejarawan senior yang terbit pada 2012 memiliki narasi yang berbeda dengan SNI. IDAS merupakan salah satu buku prestise selain SNI. Buku ini mendapatkan sambutan langsung oleh mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Bambang Sudibyo, Direktur Jendral Sejarah dan Purbakala Heri Untoro Dradjat, dan bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kata pengantarnya, buku yang terdiri dari 9 jilid ini disusun karena, sejak diterbitkannya SNI telah terdapat perkembangan-perkembangan dalam penelitian sejarah Indonesia. Taufik Abdulah (2012) selaku editor sendiri mengatakan bahwa buku ini bukan revisi dari SNI melainkan karya tersendiri. Dalam menggambarkan Peristiwa Santa Cruz, buku tersebut menuliskan:

Pada 12 November 1991, diadakan misa suci bagi arwah Sebastiao Gomes di Gereja Motael, Dili. Proses misa ini dihadiri oleh sekitar 2.500 orang yang kemudian bergerak menuju tempat pemakaman Santa Cruz untuk menabur bunga. Namun, saat arak-arakan warga melewati Hotel Turismo, masa mengibarkan bendera Fretilin dan poster Xanana Gusmao serta meneriakkan yel-yel “Hindup Kemerdekaan!”. Arak-arakan yang dikawal oleh pasukan ABRI itu kemudian menjadi rusuh ketika ada yang menyerang dan melukai Mayor ABRI Andi Gerhan Lentara. Dalam keadaan yang kacau, terjadilah penembakan dari pasukan ABRI ke arah demonstran yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Dalam peristiwa tersebut, seorang berkebangsaan Selandia Baru tewas, dua wartawan AS terluka, dan seorang wartawan Inggris ditangkap ABRI. Fretilin lalu menuduh ABRI telah melakukan pembantaian di Santa Cruz” (Didik, 2012, hlm. 541).

Berbeda dengan narasi yang disajikan SNI, dalam IDAS, korban nyawa diakibatkan langsung oleh militer yang menembaki kerumunan. Narasi serupa juga dituliskan oleh salah satu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012, yaitu Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara-Timor Leste (2012).

### **Integrasi Timor Leste dalam Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)**

Dalam laporan Komisi, setelah revolusi di Portugal pada 1974, pemerintah Indonesia meningkatkan operasi pengumpulan intelijen di Timor Leste. Upaya untuk memengaruhi politikus Timor Leste juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada awal 1975, Indonesia menyusun rencana solusi militer. Pendekatan militeristik tersebut merupakan akibat dari keyakinan pemerintah bahwa integrasi tidak mungkin tercapai tanpa menggunakan kekerasan. Pemerintah Indonesia menganggap Timor Leste akan menjadi ancaman bagi keamanan bila merdeka yang bisa dilihat dalam konteks Perang Dingin. Hal tersebut juga yang membuat Indonesia mendapatkan dukungan oleh para sekutu Barat dan Asianya (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 192).

Di awal 1975, campur tangan pemerintah Indonesia dapat terbilang sudah terbuka. Simpatisan Apodeti diketahui dilatih oleh pasukan khusus. Setelah pembentukan koalisi UDT dan Fretilin pada akhir Januari, Indonesia mulai mengintensifkan aktivitas militer mereka. Pada bulan berikutnya, dilaksanakan latihan lintas angkatan secara masif di Sumatra Selatan yang dapat terbilang merupakan gladi resik bagi invasi skala penuh. Hal tersebut ditambah juga kehadiran para serdadu di sepanjang perbatasan Timor Leste (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 192–193).

Aktivitas militer Indonesia berbarengan dengan aktivitas diplomatik. Kehadiran Fretilin dan turunnya presiden konservatif Portugal Spínola pada September 1974 membuat pemerintah Indonesia khawatir dan perlu adanya tindakan pemerintah Portugal yang baru terkait kawasan tersebut. Dalam laporan delegasi Indonesia, terdapat kesepakatan bahwa di antara pemimpin Portugis dan Indonesia bahwa integrasi merupakan hasil yang terbaik dalam pertemuan di Lisbon. Pada 9 Maret 1975 dalam pertemuan di London, pemerintah Indonesia secara tegas mengatakan bahwa integrasi adalah satu-satunya solusi serta menganjurkan agar Indonesia memiliki peran sebagai penasihat dalam pemerintahan transisi koloni tersebut. Seperti pertemuan sebelumnya, Portugal menekankan kembali prinsip bahwa rakyat Timor Leste perlu untuk didengar perihal masa depan koloni tersebut. Menurut Komisi, Portugal nampaknya tetap memberi angin kepada Indonesia ketika, misalnya, mereka berpendapat bahwa Indonesia berhak untuk memberi dukungan aktif pada Apodeti. Tindakan tersebut menurut yang Komisi memberikan Indonesia status yang melampaui status “pengamat berkemungkinan”. Indonesia sendiri

menafsirkan bahwa mengalahkannya Portugal menandakan pihak mereka memiliki pandangan yang sama bahwa integrasi merupakan hasil terbaik. Hal tersebut dikatakan Presiden Soeharto sendiri kepada Perdana Menteri Australia Gough Whitlam (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 195). Whitlam sendiri mengatakan kepada Soeharto bahwa pemerintahannya menganggap Timor Leste seharusnya menjadi bagian dari Indonesia. Ia menjustifikasinya dengan mengatakan bahwa rakyat biasa di Timor Leste tidak memahami politik (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 196).

Pertemuan selanjutnya di Makau pada 25-28 Januari diboikot oleh Fretilin yang mengatakan pertemuan tersebut adalah taktik Portugal dan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor ke Indonesia. Hasil pertemuan tersebut adalah Undang-Undang 7/75, yang memaparkan struktur pemerintahan sementara dengan partisipasi semua partai yang akan melaksanakan pemilu pada 1976 dan mengakhiri kekuasaan Portugis pada 1978 (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 198).

Setelah UDT melancarkan gerakan bersenjata pada 11 Agustus yang diklaim bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan elemen-elemen ekstrimis dari Timor Leste untuk mencegah intervensi Indonesia, Fretilin yang sebelumnya terpukul mundur melakukan serangan balasan pada 20 Agustus dengan bantuan anggota militer Portugis asli Timor Leste. Dalam bulan September sebanyak 20.000 orang yang sebagian besar dari UDT terdesak menuju perbatasan Timor Barat dan menyebrangi perbatasan pada akhir bulan. Pada September 1975 pemerintah Indonesia mengharuskan UDT dan sekutu-sekutunya yang melintasi perbatasan Indonesia mendatangi petisi prointegrasi dengan imbalan dukungan logistik dan militer (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 200).

Komisi mendapatkan kesaksian tentang dampak dari konflik internal Timor Leste kepada rakyat banyak. Konflik tersebut bahkan masih bisa dirasakan hingga sesudah kemerdekaan Timor Leste nantinya. Anggota UDT bertanggung jawab atas pembunuhan berbagai tahanan Fretilin di sejumlah tempat. Sebanyak 348 pembunuhan telah dilaporkan kepada Komisi. Berdasarkan pada penelitiannya serta pada laporan masa itu dari organisasi seperti Komite Palang Merah Internasional, yang bekerja di Timor Leste saat itu, Komisi memperkirakan bahwa antara 1.500 dan 3.000 orang terbunuh semasa konflik perang saudara tersebut. Komisi memperlihatkan bahwa sebagian besar pembunuhan dilaksanakan oleh Fretilin. Namun UDT juga melakukan pembunuhan massal (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 204).

Selama dan sesaat konflik internal tersebut, di awal September berbagai kelompok Timor Leste di Maliana dan Suai dua kali memproklamasikan integrasi dengan Indonesia. Pada 7 September di Batugede, para pemimpin UDT, KOTA, serta Trabalhista mengeluarkan petisi bersama yang ditunjukan kepada Presiden Soeharto untuk meminta Timor Leste diintegrasikan dengan Indonesia. Setelah menang, Fretilin melakukan deklarasi kemerdekaan sepihak pada 28 November 1975. Sehari setelah proklamasi sepihak Fretilin, partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista mengeluarkan "Proklamasi Integrasi" untuk sebagai respon atas gerakan Fretilin tersebut (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 219, 221).

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan mengesahkan invasi besar-besaran ke Timor Leste setelah deklarasi kemerdekaan diproklamasikan oleh Fretilin. Perwakilan Indonesia menyesalkan proklamasi sepihak Fretilin, tetapi mendukung proklamasi dari UDT, Apodeti, KOTA, serta Trabalhista. Invasi tersebut dilegalkan oleh MPR atas dasar tindakan Fretilin yang dianggap bertentangan dengan proses dekolonisasi yang telah disetujui sebelumnya. Serangan besar-besaran dilaksanakan pada 7 Desember 1975 atas Dili dengan melibatkan kekuatan laut dan udara (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 222).

Dalam invasi ini, narasi bahwa tidak ada satupun anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang terlibat di pertahankan dengan menghapus tanda pengenalan pada pesawatnya. Prajurit Indonesia menggunakan senjata AK-47 dan senjata ringan yang diperoleh dari Benny Moerdani, khusus untuk persoalan Timor Leste. Hal ini bertujuan untuk menyangkal keterlibatan ABRI serta menghindarkan pelibatan penyalur senjata ABRI, khususnya Amerika. Roger East, seorang Australia, merupakan satu-satunya wartawan Asing yang tetap berada di Timor Leste terbunuh oleh pasukan Indonesia pada saat pendaratan. Dalam kurang dari dua bulan wartawan asing yang terbunuh menjadi enam. Hal ini membuat kisah mengenai invasi Indonesia tidak diliput secara dekat oleh dunia Internasional (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 228-229).

Militer Indonesia mempertahankan narasi bahwa invasi dilakukan oleh pasukan Partisan Timor dari empat partai politik yang mendeklarasikan Deklarasi Balibo. Melalui Antara, media resmi pemerintah Indonesia, mengatakan Dili jatuh pada 7 Desember ke tangan pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalhista dan hanya menyebutkan secara sepintas tentang "sukarelawan" Indonesia yang berpartisipasi dalam operasi tersebut. Para jurnalis Indonesia turut

menyebarkan dan berkali-kali memberitakan narasi tersebut. Mitos tentang Indonesia tidak menginvasi Timor Leste melainkan partai pendukung integrasi yang datang kembali mengambil kekuasaan di wilayah mereka dengan bantuan sebagian kecil sukarelawan Indonesia (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 229)

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai invasi 7 Desember 1975 adalah pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa. Bahkan sebelum invasi besar-besaran telah terdapat kekerasan yang dilakukan oleh prajurit Indonesia. Misalnya, Dari data yang dikumpulkan oleh Komisi, jumlah kematian terbesar semasa operasi militer rahasia pra-invasi terjadi di Distrik Ermera (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 884). Salama invasi, menurut yang dilaporkan kepada Komisi dari 7 Desember hingga 10 Desember jumlah warga sipil yang dibunuh atau dieksekusi sebanyak 203 hingga 272 warga. Pembunuhan dan penghilangan paksa di luar hukum dilanjutkan setelah invasi pada 1976 hingga 1979. Sepanjang tahun-tahun tersebut Indonesia mulai berhasil mengonsolidasi kekuasaannya atas wilayah Timor Leste. Banyak warga sipil pada periode ini ditahan di tempah tahanan militer tanpa dakwaan dan proses pengadilan. Terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam berbagai macam keadaan seperti pembunuhan warga sipil saat sedang melakukan kegiatan sehari-hari, pembunuhan warga sipil selama operasi militer, pembunuhan terhadap tahanan, pembunuhan seketika terhadap warga yang menyerah, pembunuhan yang disasarkan terhadap para anggota Fretilin yang menyerah. Semua pembunuhan terhadap penduduk sipil dalam tahanan adalah di luar hukum dan tidak sah (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 926).

Beberapa Penduduk yang terbunuh ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari salah satunya dilaporkan oleh seorang saksi, yang ketika pada April 1976 empat anggota keluarganya tewas ditembak marinir ketika sedang mencari makam di Bermet Buiudo yang terletak di dekat pos marinir itu. Pembunuhan terhadap sipil secara sewenang-wenang juga terjadi ketika militer sedang berpatroli atau melakukan operasi militer. Komisi mendapatkan laporan bahwa ketika prajurit memasuki Laos (Dare, Dili) pada 11 Februari 1976 mereka membayonet hingga tewas dua orang penduduk yang bernama Antonio Soares dan Inácio de Jesus. Beberapa penduduk yang dicurigai bekerjasama dengan Fretilin atau mengetahui tentang mereka juga menjadi korban pembunuhan. Hal ini terjadi kepada dua belas warga yang dituduh mencuri amunisi untuk diberikan kepada Fretilin. Namun, dalam Laporan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa tidak hanya dilakukan

oleh ABRI tetapi juga oleh pihak Fretilin (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 927). Laporan-laporan lainnya dalam kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan oleh ABRI dan Fretilin telah dituliskan secara rinci oleh Komisi.

Bencana lain yang dihadapi oleh rakyat Timor Leste adalah pemindahan dan kelaparan. Penyerbuan 7 Desember 1975 mengakibatkan evakuasi banyak penduduk ke wilayah-wilayah pegunungan yang berada di bawah Fretilin. Pengungsi yang begitu besar tersebut mengakibatkan kesulitan bagi sumber daya dan kemampuan organisasi Fretilin. Serangan besar militer Indonesia antara 1977 dan akhir 1978 membuat kondisi menjadi lebih sulit lagi di hutan dan pegunungan di mana ratusan warga yang pada akhirnya memaksa Fretilin membolehkan warga menyerah kepada pasukan Indonesia. Dalam kontrol pihak Indonesia, mereka menghadapi kondisi yang lebih buruk lagi di dalam "kamp permukiman". Suplai persediaan yang disediakan Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Para warga juga dibatasi dalam bergerak, menjadikan mereka mustahil menghidupi kebutuhan sendiri. Akibat hal tersebut terjadi bencana kelaparan yang merenggut ribuan nyawa. Lembaga-lembaga internasional baru boleh diizinkan memberikan bantuan hanya setelah tujuan militernya tercapai (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1296).

Baru pada 1979 dua lembaga internasional diberikan izin untuk memberi bantuan pada penduduk, yaitu *Catholic Relief Services* (CRS) dan Komite Internasional Palang Merah. CRS memperkirakan sebanyak 300.000 jiwa yang menderita busung lapar serius atau kritis (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1387). Komisi (2010, hlm. 1395) berpendapat bahwa kelaparan tidak disebabkan cuaca yang tidak biasa, El Nino, seperti pendapat yang oleh beberapa orang. Namun disebabkan oleh prajurit yang tidak memberikan izin bantuan makanan dan membiarkan penduduk kembali ke rumah. Hal tersebut dilakukan oleh prajurit untuk mengalahkan Fretilin. Komisi mengambil kesimpulan bahwa kebijakan dan praktik militer Indonesia bertanggung jawab langsung atas bencana kelaparan di Timor Leste pada 1978-1979.

#### **Peristiwa Santa Cruz dalam Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)**

Pembunuhan massal atau pembantaian Santa Cruz merupakan penembakan seribu lebih demonstran yang berkumpul di pemakaman Santa Cruz, di Dili, pada 12 November 1991. Menurut laporan tulisan dari Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste terdapat ketegangan di Dili yang dipicu oleh pengumuman pada Agustus tentang agenda

kunjungan delegasi parlemen Portugis. Pihak anti-integrasi merencanakan demonstrasi besar yang akan dilaksanakan pada saat kunjungan yang direncanakan pada 4 November. Namun pada 25 Oktober parlemen Portugis membatalkan agenda kunjungan yang membuat para aktivis kecewa. Pada akhir 28 Oktober militer menyerbu Gereja Moteal. Dalam penyerbuan tersebut salah seorang aktivis, Sebastião Gomes Rangel, tewas. Pemakaman dilaksanakan keesokan harinya. Aktivis kemerdekaan merencanakan akan menggunakan acara penaburan bunga untuk Sebastião Gomes pada 12 November, berketetapan dengan Peter Kooijmans, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan yang tengah berada di Dili, untuk melakukan demonstrasi menuntut kemerdekaan (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1106).

Pada 12 November, sekitar 3.500 orang menghadiri misa di Gereja Moteal. Dari gereja, kemudian orang-orang tersebut menuju ke pemakaman Santa Cruz yang berubah menjadi demonstrasi. Para aktivis kemerdekaan memapangkan spanduk-spanduk dan bendera-bendera kemerdekaan. Di depan kantor Dharma Wanita, sekitar pukul 07.15, terjadi perkelahian yang menyebabkan Mayor Andi Gerhan Lantara ditusuk. Salah seorang demonstran bernama Leonardo de Araújo mengatakan ke Komisi bahwa ia juga ditusuk di kaki bagian kanan oleh orang yang berseragam loreng di dekat Kodim. Para demonstran memasuki pemakaman Santa Cruz pada 07.50 (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1106–1107).

Menurut Komisi (2010, hlm. 1107), dari dokumen militer Indonesia yang mereka dapatkan pada 2004, satuan-satuan yang dikerahkan dalam demonstrasi tersebut antara adalah satu peleton Brimob 5486 yang berada di bawah komando Letnan Satu Polisi Maman Hermawan, Kompi Gabungan yang dikomandoi oleh Letnan Dua Sugiman Mursanib yang terdiri dari satu peleton dari Brimob 5486 yang dipimpin oleh Letnan Dua Rudolf A. Roja dan tiga peleton dari Batalion 303 terdiri atas Kompi C yang dipimpin oleh Letnan Dua John Arionang, Kompi D dipimpin oleh Letnan Handrianus Eddy Sunaryo, dan satu kompi lain yang komandannya tidak diketahui, satu kelompok sekitar 24 prajurit dari Kompi A, Batalion 303 di bawah Kapten Yustin Dino, dan satu detasemen antihuru-hara dari Batalion 744.

Dalam penyelidikan Polisi Militer, mengidentifikasi prajurit pertama yang melepaskan tembakan adalah Sersan Satu Udin Syukur yang dalam persidangannya mengatakan alasan untuk menembak adalah pertengkarnya dengan demonstran. Namun menurutnya tembakan tersebut tidak mengenai siapa pun. Komisi mendapatkan laporan dari seorang

aktivis, Marito Moro, mengatakan bahwa ia melihat seorang aktivis mendekati para prajurit dan berusaha mengatakan sesuatu. Aktivis tersebutlah yang pertama ditembak dan sesudah itu para demonstran panik dan mulai lari berpecah. Tidak lama kemudian terjadi penembakan secara intensif dalam beberapa waktu (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1107–1108).

Para prajurit mulai menembak dari dalam Taman Makam Pahlawan Seroja yang bersebrangan dengan pemakaman Santa Cruz. Seorang saksi, Simplicio Celestino de Deus mengatakan banyak yang terbunuh pada saat penembakan utama dan juga dengan cara lain setelah kejadian tersebut. Bahwa banyak banyak yang terbunuh di dalam pemakaman tapi lebih banyak lagi yang tewas di luar pemakaman ketika mereka sedang berlari atau diambil di tempat persembunyiannya di rumah-rumah dan tempat lain, kemudian dibunuh. Tentara menggunakan senjata-senjata otomatis untuk menembaki demonstran yang tidak bersenjata. Banyak di antara demonstran lari ke kompleks pemakaman tersebut. Komisi mendengar kesaksian bahwa para tentara kemudian mengepung pemakaman Santa Cruz, lalu masuk dan membunuh orang-orang, yang tadinya tidak terluka atau hanya terluka ringan, dengan menusuk mereka dengan pisau bayonet (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 294).

Banyak pemuda yang diangkut dengan truk ke rumah sakit militer Wira Husada di Lahane, Dili, ke pusat-pusat interogasi, atau dibunuh langsung. Di kediaman Uskup Belo, ratusan pemuda mencari perlindungan. Uskup menghubungi Gubernur Mario Carrascalão, dan pergi ke Santa Cruz, di mana ia melihat sejumlah tubuh orang yang terbunuh dan terluka, kemudian mengunjungi rumah sakit Wira Husada tempat dia melihat hasil pemukulan yang parah. Komisi mendengarkan kesaksian yang menyebut tentang serangkaian pembunuhan dalam hari-hari sesudahnya, ketika pasukan keamanan Indonesia memburu orang-orang yang dicurigai terlibat dalam unjuk rasa. Komisi juga mendengar tentang orang-orang hilang yang belum ditemukan dan tentang kekerasan seksual terhadap para perempuan muda di Santa Cruz (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 294).

Di rumah sakit Wira Husada, terdapat dugaan menjadi tempat pembunuhan. Pada 1994, dua saksi mengatakan bahwa mereka menyaksikan pembunuhan orang-orang yang dibawa ke Rumah sakit militer Wira Husada setelah terluka di Santa Cruz. João Antonio Dias, teknisi laboratorium rumah sakit, menginformasikan kepada Komisi bahwa tablet-tablet formalin diberikan kepada orang-orang yang terluka. Ia mendengar para

prajurit di rumah sakit mengatakan ingin membunuh orang-orang yang terluka secara cepat dan diam-diam (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1112).

Dalam pembantaian tersebut, menurut Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk melakukan penyidikan, menyimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan reaksi dari aparat keamanan untuk membela diri yang dilakukan tanpa perintah dari atasan sehingga mengakibatkan menembakan yang berlebihan. Pemerintah Indonesia sendiri mengatakan bahwa jumlah korban yang tewas akibat peristiwa ini sebanyak 19 orang dan 65 orang dinyatakan hilang. Namun, menurut dua LSM Portugis, terdapat jumlah korban yang tewas sebanyak 271 dan 382 mengalami luka-luka, dan 250 orang dinyatakan hilang (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1113).

Hal yang berbeda dari Peristiwa Santa Cruz dengan korban yang jatuh akibat integrasi Indonesia pada 1975 adalah pembantaian ini diketahui oleh publik. Media Barat hadir menyaksikan dan mengabarkan berita tersebut. Misalnya, jurnalis lepas Allan Narin dan Pacifica Radio's Amy Goodman dari Amerika Serikat, Russell Anderson dari Australia, Max Stahl, jurnalis Inggris untuk Yorkshire Television hadir dalam peristiwa tersebut. Max Stahl merekam sebagian dari pembantaian tersebut kemudian mengubur film tersebut di kuburan yang baru digali. Setelah Max ditangkap oleh prajurit dan diinterogasi selama berjam-jam kemudian di malam yang sama ia mengambil kembali rekaman tersebut. Bersama dengan Saskia Kouwenberg, aktivis Belanda, rekaman tersebut berhasil diselundupkan dan disiarkan ke televisi di seluruh dunia (Nevins, 2005, hlm. 33).

Dalam sebuah artikel beberapa minggu setelah kejadian tersebut berlangsung, M Ximenes Magno dan Akhmad Zaini menuturkan adanya kegamangan, trauma, dan juga perhatian mata internasional kepada Indonesia terkait peristiwa tersebut. Namun, di sini kedua penulis tersebut cenderung menyalahkan pemerintah Portugal dan Fretilin dan seperti terkesan "memuji" pemerintah Indonesia dengan penyematan kalimat pembentukan Komisi Penyelidik Nasional yang saat itu tertanggal 28 November memulai pekerjaannya untuk menelisik peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kedua penulis melihat peristiwa tersebut dari kaca mata "integrasi" Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Kata "integrasi" disebutkan sebanyak tiga kali, "berintegrasi" satu kali. Menariknya, mereka berdua juga melakukan analisis sosial-ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat Timor-Timur pasca masuk ke dalam wilayah Indonesia yang bisa dirumuskan menjadi lima permasalahan mendasar; trauma budaya, ketidakadilan, superioritas ekonomi

orang luar daerah, superioritas politik, dan permasalahan bersih diri dari afiliasi partai ("Timor Timur: Langit Biru atau Kelabu?," 1991, hlm. 4).

### **Bias dalam Penulisan Sejarah Timor Leste dalam Teks dan Historiografi Indonesia: Analisis Wacana Kristis**

Dalam analisis teks, narasi dalam teks-teks resmi Indonesia cenderung menggambarkan integrasi Timor Leste sebagai sesuatu yang wajar dan diinginkan oleh rakyat Timor Leste sendiri. Narasi ini didukung oleh tiga argumen utama: pertama, adanya kesamaan kultural antara Indonesia dan Timor Leste yang dianggap hanya dipisahkan oleh kolonialisme Portugal dan Belanda selama bertahun-tahun; kedua, anggapan bahwa Timor Leste tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup cakap untuk membangun kehidupan politiknya sendiri; dan ketiga, kepentingan stabilitas politik di kawasan kepulauan Nusantara. Argumen terakhir ini diperkuat dengan contoh krisis pengungsi dari Timor Leste ke wilayah perbatasan yang dianggap merugikan Indonesia secara finansial, serta interpretasi pemerintah Indonesia terhadap ideologi Fretilin sebagai gerakan yang berhaluan komunis.

Kerugian finansial bagi Indonesia akibat ketidakstabilan politik dalam negeri Timor Leste yang diakibatkan oleh perang saudara di Timor Leste, baik SNI edisi 1984 maupun edisi pemuatannya tidak menyebutkan gerakan kudeta 11 Agustus oleh UDT yang sebenarnya merupakan penyebab utama konflik tersebut secara eksplisit. SNI hanya menuliskan "MAC bersama dengan Apodeti, Kota, dan Tralabista kemudian melakukan perlawanan gabungan menghadapi Fretilin". Namun, SNI menuliskan keagresifan Fretilin dengan latar belakang yang kurang jelas dengan menarasikan "Sementara itu perkembangan di Timor-Timor semakin hangat dan tegang. Akibat kekejaman teror, pelarian dari Timor Leste ke Indonesia makin meningkat bahkan mencapai 50.000 orang" (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 491, 2019, hlm. 628). Peristiwa kudeta baru secara eksplisit dituliskan pada oleh Kristiadi (1986) dan (Lapian & Chaniago, 1988).

Dalam hal penaklukan Dili oleh oposisi Fretilin, teks-teks di atas tidak menonjolkan peran dari militer Indonesia. SNI, Timor Timur dalam Gerak Pembangunan, serta artikel dari J. Kristani lebih memfokuskan peran gabungan oposisi Fretilin yang dibantu oleh sukarelawan Indonesia. Dalam SNI (1984, hlm. 493), sukarelawan Indonesia sendiri merupakan permintaan dari rakyat Timor Leste beserta dengan desakan rakyat Indonesia melalui DPR. Pemerintah sendiri dituliskan "...sukar menahan para sukarelawan tersebut melindungi para

pengungsi kembali ke kampung halamannya dan membantu saudara-saudaranya membebaskan diri dari penindasan dan teror Fretilin.”

Militer Indonesia, dalam tulisan Kristiadi (1986, hlm. 950–951) muncul ketika terjadi baku tembak dengan Fretilin di wilayah perbatasan dan juga ketika Apodeti meminta bantuan senjata. Dalam tulisan Kristiadi, militer Indonesia bahkan dinarasikan tidak akan campur tangan sama sekali dalam urusan konflik saudara di Timor Leste. ia menuliskan:

Bahkan panglima pasukan UDT, Joao Carrascalao (yang kemudian mengungsi ke Portugal), menyerukan agar Indonesia segera melancarkan ofensif militernya untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Namun, seperti sudah diuraikan di muka, permintaan ini tidak bisa diterima karena Indonesia harus berpegang pada sikap dasar. Karena itu untuk mencapai tujuannya, mereka harus meneruskan perjuangannya dan harus bersatu dengan Apodeti dan unsur-unsur lainnya seperti Partai Kota dan Trabalista.

Baik SNI edisi 1984 dan edisi penerbitan terakhir menuliskan “Beberapa hari setelah kota Dili direbut, pasukan gabungan Apodeti telah berhasil menguasai Timor Timur”. Surat kabar Indonesia juga mendukung narasi tersebut, misalnya dalam harian Kompas 8 Desember 1975 dalam artikel “Dili Jatuh” menyalurkan ulang pernyataan pemerintah tentang kejatuhan Ibukota Dili, 7 Desember 1975 jam 12.30 “telah dibebaskan oleh perlawanan rakyat yang di pelopori oleh Apodeti, UDT, KOTA, dan Tribalhista.” serta menyebutkan “dalam serangan terhadap ibukota Timor-Portugis itu, pasukan perlawanan rakyat mendapat bantuan dari sukarelawan-sukarelawan Indonesia” (“Dili Jatuh,” 1975). Dikarenakan pembahasan tentang peran aktif prajurit Indonesia atau yang biasa disebut Operasi Sejora tidak ditonjolkan maka kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di mana prajurit Indonesia terlibat pun tidak diungkapkan seperti yang telah dituliskan oleh Komisi (CAVR).

Selain itu, sesuai dengan kondisi perang dingin dan di bawah Orde Baru yang sangat anti komunis, asosiasi antara gerakan komunisme dengan Fretilin kerap ditekankan. Beberapa di antaranya, misalnya SNI (1975, hlm. 488) dengan narasi “... Fretilin ternyata makin bergerak ke arah komunisme” dan juga sebagai berikut:

Mereka ingin menciptakan masa depan [sic] Timor Timur menguntungkan bagi gerakan Komunis Internasional. Perembesan unsur-unsur gerakan Marxis ke Timor Timur sudah dimulai sejak bulan Agustus 1974, yaitu dengan datangnya lima orang

mahasiswa kader komunis dari Lisabon untuk menggarap Fretilin. Dengan demikian Fretilin dapat menjadi organisasi dan gerakan marxis [sic] yang lebih unggul (Poesponegoro & Notosusanto, 1984, hlm. 490).

Tentang seberapa jauh hubungan gerakan komunis dan Fretilin sendiri masih memunculkan banyak perdebatan. Komisi (2010, hlm. 186) sendiri mengatakan bahwa tidaklah benar menyimpulkan Fretilin adalah partai komunis pada 1974–1975 meskipun beberapa anggotanya merupakan komunis. Lebih tepat mengatakan bahwa spektrum politik kepemimpinan Fretilin adalah kiri-tengah. João Carrascalão sendiri, pemimpin UDT setelah gerakan antikomunis 11 Agustus, mengatakan bahwa Fretilin bukan partai komunis meskipun beberapa pemimpinnya merupakan komunis.

Mengenai Peristiwa Santa Cruz, dalam narasi SNI edisi penerbitan terakhir, tewasnya banyak korban dalam peristiwa disebabkan oleh kepanikan yang menyebabkan orang-orang terinjak-injak dan bukan karena tembakan langsung dari aparat militer. Narasi tersebut tentunya memiliki kecenderungan yang bias karena rujukan yang digunakan adalah buku Sejarah TNI jilid V (2000) yang ditulis oleh Pusat Sejarah TNI. Narasi yang disajikan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jendral TNI Sintong Pandjaitan pada tanggal 13 November 1991 memberikan penjelasan tentang peristiwa tersebut di Kantor Polisi Milayah (Polwil) Dili, antara lain sebagai berikut: “Walaupun ketegangan di pihak ABRI sudah memuncak, karena dituduhnya Mayor Infanteri Gerhan Lantara, namun perintah yang diberikan kepada para prajurit adalah dilarang menembak. Sekalipun demikian, bentrokan senjata tidak dapat dihindarkan, dengan alasan kedudukan mereka terdesak. Sewaktu tembakan diarahkan ke atas, massa terus bergerak maju, sehingga mengakibatkan ribuan rakyat di sekitarnya terinjak-injak, suasananya pun kacau” (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, hlm. 71).

Dalam keterangannya sumber yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah “Fakta di Balik Berita (dokumen)” dari Pusat Penerangan TNI. Meski identitas rujukannya tidak terlalu jelas, narasi tersebut nampaknya menggunakan Laporan Warouw Pertama. Laporan tersebut terdiri atas 22 halaman yang ditandatangani oleh Brigadir Jendral Warouw yang disusun berdasarkan dokumen sebanyak 12 halaman yang disusun oleh Kolonel Binsar Aruan yang merupakan komandan Sektor C yang daerah militernya termasuk Dili. Menurut Komisi, laporan tersebut bersifat bias sebab dilakukan

oleh orang yang memimpin angkatan bersenjata di Timor Leste dan dengan begitu termasuk elemen yang bertanggung jawab terhadap aksi militer di Santa Cruz. Selain itu, sejak semula pihak militer berasumsi bahwa demonstrasi diatur oleh gerakan perlawanan. Hal tersebut memberikan justifikasi untuk melakukan tindakan militer (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1122).

Menurut laporan tersebut, Letnan Dua Mursanib memerintahkan bawahannya untuk menembakan peringatan ke udara. Namun, masa terus bergerak maju, selain ini terdapat teriakan-teriakan untuk menyerang dan pelemparan batu-batu oleh demonstran. Setelah tembakan peringatan kedua, sebuah granat dengan kunci yang masih terpasang di lemparkan ke arah prajurit militer kemudian ditangkap oleh Mursanib. Terjadi konfrontasi ketika demonstran mencoba merebut senjata dari para prajurit. Kemudian, melihat situasi genting tersebut, senjata ditembakkan selama enam sampai delapan detik. Massa yang berkumpul terinjak-injak dan banyak yang terluka karenanya. Berdasarkan fakta-fakta versi laporan ini, para petugas keamanan bertindak membela diri dan tanpa pikir panjang, dalam kondisi tertekan oleh massa yang menyerang serta mengancam nyawa mereka dan kata-kata hinaan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para prajurit memiliki anggapan bahwa para demonstran sebagai bagian dari gerakan perlawanan dan dengan begitu menganggap mereka sebagai musuh. Laporan tersebut menegaskan bahwa prajurit profesional diharuskan mengambil tindakan tegas, cepat, dan tepat dalam kondisi-kondisi mencekam ketika nyawa dan senjata mereka terancam. Masalah ini dikaitkan dengan usaha dari prajurit untuk membela kedaulatan dan kehormatan bangsa karena Fretilin merupakan musuh yang harus dilenyapkan. Komisi sendiri menilai bahwa penyelidikan Laporan Warouw merupakan kegagalan dalam metode dan cara investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh militer (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. 1123).

Berbeda dengan penggambaran peristiwa yang digambarkan SNI, tidak terdapat narasi bahwa banyaknya korban yang meninggal akibat kepanikan yang menyebabkan massa terinjak-injak dalam penggambaran oleh IDAS. Acuan pustaka yang digunakan pun berbeda. Bukan menggunakan sumber dari TNI, melainkan dari peneliti luar negeri, yaitu Bilveer Singh, dalam *Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan* (1998). Dalam karya tersebut penulisan sejarah tidak digunakan sebagai pembelaan. Narasi sejarah versi resmi seperti dalam SNI dan buku teks menunjukkan kecenderungan untuk menyamarkan atau menghapus peran aktif militer Indonesia dalam integrasi Timor Leste dan Peristiwa Santa Cruz.

Dalam dimensi praktik diskursif, produksi teks sangat dipengaruhi kepentingan pemerintah Indonesia, terutama di era Orde Baru. SNI pertama kali diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan edisi 1984 dan pemuktahiran diterbitkan oleh Balai Pustaka merupakan perusahaan negara (BUMN). Sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah tersebut cenderung bias dengan menggunakan laporan militer, yang sebenarnya merupakan pelaku kekerasan, untuk menggambarkan Peristiwa Santa Cruz. Hal ini menjadikan narasi tersebut sebagai pembelaan. Argumen ini kemudian didistribusi teks melalui buku sejarah resmi dan buku teks sekolah menjadikannya narasi dominan yang disebarluaskan.

Teks-teks ini dikonsumsi oleh pelajar melalui kurikulum pendidikan nasional. SNI dibaca oleh umum, mahasiswa, khususnya studi sejarah, dan cedeikawan khususnya. buku tersebut juga kerap menjadi rujukan dalam kurikulum sekolah. Dengan begitu, wacana sejarah mengenai integrasi Timor Leste dan Peristiwa Santa Cruz yang dominan di ruang publik Indonesia merupakan hasil dari proses produksi diskursif yang terkonsentrasi di tangan negara dan institusi hegemonik. Narasi-narasi ini tidak hanya diproduksi tetapi juga direproduksi dan disebarkan agar sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Dalam dimensi praktik sosial, dominasi narasi integrasi Timor Leste sebagai tindakan sukarela dan wajar dalam berbagai sumber resmi tidak terlepas dari konteks sosial-politik Orde Baru yang otoriter dan sangat antikomunis. Dalam rezim ini, sejarah dijadikan instrumen politik untuk membangun legitimasi nasionalisme otoriter dan melanggengkan kekuasaan militer. Melalui pendekatan ideologis negara, institusi pendidikan, dan media berperan sebagai aparatus ideologi negara yang berfungsi memproduksi pemahaman atas realitas sejarah. Dalam konteks ini, sejarah menjadi instrumen normalisasi dan pembenaran dari tindakan negara.

Narasi tentang Fretilin sebagai komunis, mengaburkan keterlibatan TNI dalam kekerasan, serta pemaknaan tragedi Santa Cruz sebagai akibat “kepanikan massa” adalah contoh-contoh bagaimana wacana dibentuk untuk menutupi pelanggaran HAM. Ini merupakan bentuk dari *invented history*, sejarah yang dikonstruksi untuk menghapus kekerasan negara dan memberikan landasan moral dari tindakan integrasi. Pengaburan masa lalu sendiri bukan hal yang baru, misalnya, dalam penelitian Jess Melvin (Melvin, 2018, hlm. 1) pada peristiwa pembantaian orang-orang yang dituduh komunis pada 1965 di mana pemerintah menggambarkan pembunuhan satu juta rakyat sipil tersebut sebagai tersebut merupakan

hasil dari reaksi spontan rakyat yang berfungsi untuk mengaburkan keterlibatan militer. Sebaliknya, laporan CAVR menghadirkan bentuk *recovered history* dari suara-suara korban yang selama ini tidak terlihat oleh sejarah resmi negara. Dengan membaca narasi-narasi tersebut secara kritis, masyarakat Indonesia dapat mulai mempertanyakan wacana sejarah yang selama ini dominan, dan membuka ruang untuk rekonsiliasi yang lebih adil dan jujur.

Nampaknya kata pengantar yang ditulis oleh Nordholt (2008, hlm. xix) untuk *Ketika Sejarah Berseragam* perlu direfleksikan kembali bahwa historiografi yang berorientasi negara memiliki ironi karena kerap menghapus peristiwa-peristiwa kekerasan dalam narasi-narasinya. Hal ini terlihat bahwa historiografi Indonesia yang disebutkan di atas mereduksi kekerasan yang telah dilakukan pihak Indonesia hal proses integrasi Timor Leste dan Peristiwa Santa Cruz. Menurut Nordholt, untuk mengembalikan kredibilitas historiografi Indonesia, hanya dengan dibawa kembali ke dalam sejarah para korban pembunuhan Orde Baru.

Meskipun demikian, SNI (2019) sendiri dalam edisi pemutakhiran sebenarnya telah melakukan usaha kejujuran dalam menuliskan sejarah kelam Indonesia, khususnya di mana oleh Orde Baru terlibat di dalamnya. Terdapat sub bab berjudul “Konflik, Kekerasan, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia” yang menuliskan “Peristiwa 17 Januari 1974”, “Peristiwa Tanjung Priok”, “Peristiwa Talangsari Lampung”, dan “Peristiwa 27 Juli 1996”. Namun, dalam “Peristiwa Dili 12 November 1991” yang juga dibahas dalam sub bab tersebut masih didapatkan bias pada militerisme. Narasi tentang integrasi pun nampaknya tidak ada revisi dari edisi 1984. Hal tersebut sangat disayangkan karena edisi pemutakhiran sendiri terbit setelah Reformasi, setelah peristiwa pembakaran buku Sejarah Nasional Indonesia pada 2001 oleh mahasiswa sebagai protes terhadap kebohongan-kebohongan yang dipaksa untuk dipelajari terhadap mereka (“Demonstrasi Bakar Buku Sejarah Nasional”. Kompas, 3 Mei 2001, dalam McGregor, 2008, hlm. 285).

Dalam hal ini, perlu untuk menuliskan historiografi secara jujur. Seperti pendapat Irfan Kasim, mantan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam kata pengantar *Chega!* yang mengatakan bahwa membaca sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di Timor Leste akan membantu bangsa Indonesia memahami lebih baik mengapa setelah 24 tahun, sebagian besar orang Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Temuan-temuan dari Komisi menjadi cermin bagi bangsa Indonesia serta menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga agar kejadian-kejadian

kelam tersebut terulang kembali di masa depan (Komisi Penerimaan, 2010, hlm. XXII).

## KESIMPULAN

Teks dan historiografi Indonesia mengenai proses integrasi Timor Leste serta Peristiwa Santa Cruz menunjukkan bias terhadap kepentingan nasional Indonesia. Buku babon Sejarah Nasional Indonesia menggambarkan integrasi memang hal yang tidak masalah bila terjadi dikarenakan terdapat kesamaan sejarah dan merupakan saudara yang dipisahkan oleh kolonialisme Belanda dan Portugis. Teks Indonesia pun menganggap kekuatan oposisi dari Fretilin adalah pengembal kehendak rakyat Timor Leste, sehingga dianggap bahwa integrasi memanglah kehendak rakyat. Keterlibatan aktif militer Indonesia pun tidak ditonjolkan oleh teks-teks yang telah dibahas dan hanya menarasikan gabungan operasi Fretilin dan “sukarelawan Indonesia”. Hal tersebut diajarkan pada siswa di sekolah lewat buku teks sejarah. Setelah Timor Leste merdeka dan pascareformasi, SNI edisi termutakhir terbit tanpa merevisi pembahasan integrasi. Malahan dalam edisi terbaru muncul pembahasan baru yang juga bias dalam menggambarkan Peristiwa Santa Cruz pada 12 November 1991. Dalam SNI, banyaknya korban pada peristiwa Dili 12 November 1991 atau Peristiwa Santa Cruz, menarasikan bahwa kepanikan massa lah yang menyebabkan banyak korban nyawa akibat terinjak-injak. Dalam kasus penulisan sejarah peristiwa ini, bias sangat menonjol. Hal ini bisa dilihat karena rujukan yang digunakan dalam menarasikan peristiwa tersebut adalah buku Sejarah TNI yang ditulis oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI dengan menggunakan dokumen dari Pusat Penerangan TNI sebagai sumber. Narasi tersebut serupa dengan Laporan Warouw yang juga sangat bias karena sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan tersebut adalah anggota militer itu sendiri. Pengaburan masa lalu ini juga pernah dilakukan dalam tragedi kekerasan pada 1965 di mana satu juta orang terbunuh seperti yang ditunjukkan dalam kajian Jess Melvin. Meskipun begitu, pada 2012, buku prestisius terbit dengan nama Indonesia dalam Arus Sejarah yang ditulis juga oleh sejarawan-sejarawan dari universitas-universitas terkemuka. Dalam karya tersebut narasi “terinjak-injak” akibat panik tidak digunakan. IDAS menyajikan narasi yang berbeda dari buku babon sebelumnya. Sejak IDAS diterbitkan, perkembangan historiografi Indonesia mulai tampak lebih berimbang. Perkembangan historiografi tentunya sangat penting dalam pemahaman sejarah bangsa kita sendiri.

## REFERENSI

- Abdullah, T. (2012). Kata pengantar editor umum. Dalam T. Abdullah & A. B. Lopian (Ed.), *Indonesia dalam arus sejarah* (Vol. 8). PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ali, R. M. (2012). *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. LKiS.
- Althusser, L. (2014). *On reproduction of capitalism: Ideology and ideological apparatuses*. Verso.
- Basri, Y. (1995). *Sejarah perjuangan rakyat Timor Timur untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Curaming, R. A. (2020). *Power and knowledge in Southeast Asia: State and scholars in Indonesia and the Philippines*. Routledge.
- Departemen Penerangan. (1976). *Propinsi Daerah Tingkat I: Timor Timur*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Departemen Penerangan. (1982). *Integrasi Timor Timur*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Didik, P. (2012). Timor Timur pada Orde Baru. Dalam T. Abdullah & A. B. Lopian (Ed.), *Indonesia dalam arus sejarah* (Vol. 8). PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dili jatuh. (1975, Desember 6). *Kompas*.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language (2nd ed.)*. Routledge.
- Hudijono, S., Widiyatmika, M., & Djakariah. (2012). *Sejarah wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste: Satu gunung dua dunungan* (E. Djaenuderajat, Ed.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S., Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (1975). *Sejarah nasional Indonesia I*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kent, L. (2024). Travelling and multiscaler memory: Remembering East Timor's Santa Cruz massacre from the transnational to the intimate. *Memory Studies*, 17(2), 264–279. <https://doi.org/10.1177/17506980221150902>
- Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste. (2010). *Chegal!: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor* (Vol. 1). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Krisnadi, I. G. (2022). Historiografi Orde Baru yang hegemonik dan pembelajaran sejarah di sekolah (SMP, SMA). *Historia*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.19184/jhist.v4i2.29527>
- Kristiadi, J. (1986). *Dekolonisasi Timor Timur*. Analisis CSIS, 11, 928–960.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Lapian, A. B., & Chaniago, J. R. (1988). *Timor Timur dalam gerak pembangunan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lewis, B. (1975). *History: Remembered, recovered, invented*. Princeton University Press.
- McGregor, K. E. (2008). *Ketika sejarah berseragam: Membongkar ideologi militer dalam menyusun sejarah Indonesia*. Syarikat.
- Melvin, J. (2018). *The army and the Indonesian genocide*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351273329>
- Motadel, D. (2023). The political role of the historian. *Contemporary European History*, 32(1), 38–45. <https://doi.org/10.1017/S0960777322000716>
- Munfarida, E. (1970). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Nevins, J. (2005). *A not-so-distant horror: Mass violence in East Timor*. Cornell University Press.
- Nielsen, C. (2024). Putin's use and abuse of history as a political weapon. *Studia Philosophica Estonica*, 134–145. <https://doi.org/10.12697/spe.2024.17.12>
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (1984). *Sejarah nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (2019). *Sejarah nasional Indonesia IV: Kemunculan penjajahan di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya historiografi Indonesiasentris?!* Ombak.
- Purwanto, B., & Adam, A. W. (2017). *Menggugat historiografi Indonesia*. Ombak.
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000). *Sejarah TNI Jilid V (1984–2000)*. Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Riyanto, A. J. (2015). Lintasan sejarah tanggal 5 Oktober sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). *WIRA*, 56(40).
- Ruslan, A., S., & S. (2024). *Analysis of history textbooks: A review of Michel Foucault's power relations theory*. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14862>
- Sariyatun, Sutimin, L. A., Ardianto, D. T., & Abidin, N. F. (2024). Critical discourse analysis of G30S representations in grade XII Indonesian history textbooks: A comparative study across different curricula (1994–2013). *Theory and Practice in Language Studies*, 14(6), 1927–1936. <https://doi.org/10.17507/tpls.1406.34>
- Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022). Analisis pola narasi sejarah dalam buku teks lintas

- kurikulum di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(2), 228–243. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6632>
- Timor Timur: Langit biru atau kelabu?* (1991, Desember 6). Bernas.
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana Bhinneka Tunggal Ika dalam buku teks sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 106. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5150>
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Wodak, R. (2001). What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments. Dalam R. Wodak & M. Meyer (Ed.), *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Wood, M. (2005). *Official history in modern Indonesia: New Order perceptions and counterinterviews*. BRILL.